

BAB III

SETTING PENELITIAN

3.1 Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Kata Surabaya konon berasal dari cerita mitos pertempuran antara *sura* (ikan hiu) dan *baya* (buaya) dan akhirnya menjadi kota *Surabaya*

3.1.1 Geografi

Surabaya sebagai kota pahlawan dan sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur memiliki letak geografi yang strategis. Surabaya terletak di tepi pantai utara provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo di Selatan, serta Kabupaten Gresik di Barat. Surabaya berada pada dataran rendah, ketinggian antara 3 - 6 m di atas permukaan laut kecuali di bagian Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu di daerah Lidah dan Gayungan ketinggiannya antara 25 - 50 m di atas permukaan laut dan di bagian barat sedikit bergelombang. Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni satu dari dua pecahan Sungai Brantas.

Luas Wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Ha dengan 63,45% atau 33.048 Ha dari luas total wilayah merupakan daratan dan selebihnya sekitar

36,55% atau 19.039 Ha merupakan wilayah laut yang dikelola oleh pemerintah kota Surabaya. Kota Surabaya terletak diantara 07012' -07021' Lintang Selatan dan 112036' - 112054' Bujur Timur, merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Batas-batas wilayah Kota Surabaya

Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Temperatur Kota Surabaya cukup panas, yaitu rata-rata antara 22,60 – 34,10, dengan tekanan udara rata-rata antara 1005,2 – 1013,9 milibar dan kelembaban antara 42% -97%. Kecepatan angin rata-rata perjam mencapai 12 – 23 km, curah hujan rata-rata antara 120 – 190 mm. Jenis Tanah yang terdapat di Wilayah Kota Surabaya terdiri atas Jenis Tanah Alluvial dan Grumosol, pada jenis tanah Alluvial terdiri atas 3 karakteristik yaitu Alluvial Hidromorf, Alluvial Kelabu Tua dan Alluvial Kelabu.⁷⁰

3.1.2 Demografi

Posisi geografi sebagai permukiman pantai menjadikan Surabaya berpotensi sebagai tempat persinggahan dan permukiman bagi kaum pendatang (imigran). Proses imigrasi inilah yang menjadikan Kota Surabaya sebagai kota multi etnis yang kaya akan budaya. Beragam migrasi, tidak saja dari berbagai suku bangsa di Nusantara, seperti, Madura, Sunda, Batak, Borneo, Bali, Sulawesi

⁷⁰ Diakses melalui, <http://surabayakota.bps.go.id/index.php/tentang-daerah/keadaan-geografi-surabaya>, pada 10/01/2013 pk 20.12 WIB

dan Papua, tetapi juga dari etnis-etnis di luar Indonesia, seperti etnis Melayu, China, Arab, India, dan Eropa, datang, singgah dan menetap, hidup bersama serta membaaur dengan penduduk asli, membentuk pluralisme budaya yang kemudian menjadi ciri khas Kota Surabaya.

Suku Jawa adalah suku bangsa mayoritas di Surabaya. Dibanding dengan masyarakat Jawa pada umumnya, Suku Jawa di Surabaya memiliki temperamen yang sedikit lebih *keras* dan *egaliter*. Salah satu penyebabnya adalah jauhnya Surabaya dari kraton yang dipandang sebagai *pusat* budaya Jawa. Meskipun Jawa adalah suku mayoritas (83,68%), tetapi Surabaya juga menjadi tempat tinggal berbagai suku bangsa di Indonesia, termasuk suku Madura (7,5%), Tionghoa (7,25%), Arab (2,04%), dan sisanya merupakan suku bangsa lain seperti Bali, Batak, Bugis, Manado, Minangkabau, Dayak, Toraja, Ambon, dan Aceh atau warga asing.

Sebagai pusat pendidikan, Surabaya juga menjadi tempat tinggal mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, bahkan di antara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri. Sebagai pusat komersial regional, banyak warga asing (ekspatriat) yang tinggal di daerah Surabaya, terutama di daerah Surabaya Barat.

Jumlah penduduk Kota Surabaya dari hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 2.765.487 jiwa, dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 49% dan perempuan sebesar 51%. Penduduk Kota Surabaya bila dilihat per kecamatan jumlahnya sangat bervariasi. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan

Tambaksari yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 110.607 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 111.641 jiwa.

Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bulak yaitu terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 17.466 orang dan penduduk perempuan sebanyak 17.232 orang. Rendahnya jumlah penduduk di Kecamatan Bulak dibandingkan dengan kecamatan lain di Surabaya diduga karena Kecamatan Bulak merupakan wilayah pemukiman baru yang lahannya masih berupa tambak. Dibawah ini merupakan data penduduk kota Surabaya berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan per kecamatan yang diperoleh dari situs www.surabaya.go.id. Yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
Jumlah Penduduk Kota Surabaya

No	Kecamatan	Laki-laki	Peremuan
1	Bubutan	57.774	57.653
2	Simokerto	52.652	53.229
3	Tegalsari	59.177	59.685
4	Genteng	34.168	35.121
5	Semampir	96.956	95.264
6	Pabean Cantikan	47.339	45.953
7	Krembangan	62.874	61.616
8	Kenjeran	58.647	57.114
9	Bulak	17.466	17.232
10	Gubeng	77.589	79.006

11	Tambaksari	110.607	111.641
12	Sukolilo	49.487	49.178
13	Mulyorejo	39.365	39.429
14	Rungut	45.543	45.257
15	Tenggilis Mejoyo	27.554	27.453
16	Gunung Anyar	23.108	22.964
17	Wonokromo	93.496	92.736
18	Sawahan	110.809	11.159
19	Wonocolo	40.209	40.018
20	Jambangan	21.484	20.979
21	Gayungan	22.530	22.205
22	Karang Pil kang	34.730	34.146
23	Wiyung	29.785	29.553
24	Dukuh Pakis	29.897	29.532
25	Tandes	47.042	46.649
26	Asemrowo	19.317	18.572
27	Sukomanunggal	48.686	48.076
28	Benowo	21.156	20.887
29	Pakal	18.370	17.907
30	Lakarsantri	23.184	22.690
31	Sambikerep	25.243	24.876

Sumber: www.surabaya.go.id

Jika dilihat dari komposisi penduduk kota Surabaya pada tahun 2007 berdasarkan profesi dapat dijelaskan bahwa terbanyak adalah pegawai swasta sejumlah 684.581 jiwa, selanjutnya adalah sebagai ibu rumah tangga sejumlah 527.343 jiwa dan sebagai pelajar sebanyak 448.551 jiwa. Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan pendidikan pada tahun 2007 terbanyak adalah pada tingkat pendidikan SLTA (772.133 jiwa) kemudian SD (769.728 jiwa) serta tidak sekolah (616.240 jiwa).

Kota Surabaya merupakan kota lama yang berkembang hingga mencapai bentuknya seperti saat ini. Awalnya masyarakat tinggal dalam perkampungan. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,2 % setahun, tentu saja kebutuhan akan perumahan sangat besar. Masyarakat dapat menetap dalam perkampungan padat ataupun memilih berpindah ke real estate yang lebih teratur. Pilihan kelas real estate pun sangat beragam. Hunian bertaraf internasional yang dilengkapi dengan padang golf dengan keamanan yang ketat juga tersedia di sini. Seperti di belahan manapun di dunia, dikotomi miskin dan kaya tentu saja juga terjadi di Surabaya. Akan tetapi masing-masing dapat berdampingan dengan damai, dan tidak menjadi alasan hidup di Surabaya menjadi kurang nyaman.⁷¹

3.1.3 Ekonomi

Surabaya adalah daerah pemukiman padat, tanah-tanah dibutuhkan untuk perumahan, kebutuhan komersil dan untuk rekreasi, sehingga tidak ada lagi daerah yang kosong yang dapat digunakan untuk Sanitary Landfill. Kota Surabaya dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa, merupakan kota

⁷¹ Diakses melalui, <http://wartapedia.com/edukasi/ensiklopedia/267-surabaya.html?start=>, pada 10/10/ 2013 pk 20.08 WIB

terbesar kedua Indonesia dan sangat besar peranannya dalam menerima dan mendistribusikan barang-barang industri, peralatan teknik, hasil-hasil pertanian, hasil hutan, sembako, dan sebagainya, terutama bagi wilayah Indonesia Timur.

Mengingat peranan Surabaya yang sedemikian penting, gangguan genangan banjir yang melanda Surabaya pada setiap musim hujan sangatlah berdampak luas terhadap kelancaran roda perekonomian, kesehatan dan kenyamanan hidup masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Sebagai kota perdagangan, Surabaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan bagi hinterlandnya yang ada di Jawa Timur, namun juga memfasilitasi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Kalimantan, dan kawasan Indonesia Timur

Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk, Maspion, Wing's Group, Unilever, Pakuwon Group, Jawa Pos Group dan PT PAL. Pusat perkantoran dan highrise building (CBD) berada di sekitar Jalan Tunjungan, Basuki Rahmad, Darmo, Mayjen Sungkono, HR. Muhammad dan Ahmad Yani. Kawasan industri di Surabaya di antaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Karangpilang dan Margomulyo.

Dewasa ini terdapat belasan mal-mal besar dan puluhan supermarket besar. Pusat perbelanjaan modern ternama di antaranya: Ciputra World, Tunjungan Plaza, Pakuwon Trade Center dan Supermall Pakuwon Indah (satu gedung), Mal Galaxy, Golden City Mall, Bubutan Junction (BG Junction), Royal

Plaza, City of Tomorrow (CiTo), Surabaya Town Square (Sutos), Hi Tech Mall, Grand City Mall, Maspion Square, MEX Building, Pasar Atom Mall, ITC Surabaya, Plaza Marina (dahulu Sinar Fontana), dan Plasa Surabaya yang oleh masyarakat Surabaya lebih dikenal dengan Delta Plaza serta yang paling baru saat ini adalah Empire Palace, yang sekaligus merupakan wedding mal pertama di Indonesia. Sedangkan pusat perbelanjaan tradisional ternama di antaranya Pasar Turi, Pasar Atom, dan Darmo Trade Center (DTC) yang dahulunya adalah Pasar Wonokromo.⁷²

3.1.4 Budaya

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara pun dapai dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaaur dengan penduduk asli Surabaya membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura.

Ciri khas masyarakat asli Surabaya adalah mudah bergaul. Gaya bicaranya sangat terbuka. Walaupun tampak seperti bertemperamen kasar, masyarakat disini sangat demokratis, toleran dan senang menolong orang lain. Dalam berkesenian masyarakat disini senang dengan gerakan yang atraktif, dinamis dan humoristik. Gerak tari yang lambat kurang diterima disini.

Surabaya dikenal memiliki kesenian khas:

⁷² Diakses melalui, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya , pada 10/10/ 2013 pk 20.10 WIB

- Ludruk, adalah seni pertunjukan drama yang menceritakan kehidupan rakyat sehari-hari.
- Tari Remo, adalah tarian selamat datang yang umumnya dipersembahkan untuk tamu istimewa
- Kidungan, adalah pantun yang dilagukan, dan mengandung unsur humor

Selain kesenian khas di atas, budaya panggilan *arek* (sebutan khas Surabaya) diterjemahkan sebagai *Cak* untuk laki-laki dan *Ning* untuk wanita. Sebagai upaya untuk melestarikan budaya, setiap satu tahun sekali diadakan pemilihan Cak & Ning Surabaya. Cak & Ning Surabaya dan para finalis terpilih merupakan duta wisata dan ikon generasi muda kota Surabaya.⁷³

3.1.5 Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kota, termasuk tingkat kecerdasan masyarakat. Di Surabaya, pengembangan kegiatan pendidikan beserta penyediaan fasilitasnya, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga oleh pihak swasta dan organisasi sosial kemasyarakatan. Catatan sejarah menunjukkan, pendirian sekolah dan penyelenggaraan pendidikan di Surabaya pertama kali dilakukan pada tahun 1818.

Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1831, didirikan sekolah dasar negeri di mana untuk sekolah inipun, juga hanya terbatas untuk anak-anak orang Belanda. Sedangkan sekolah swasta, sebuah sekolah teknik yang disebut *ambachtschool*, dibuka pada tahun 1853. Usaha-usaha memajukan pendidikan khusus bagi anak-anak pribumi baru berkembang pada permulaan tahun 1900-an,

⁷³ Diakses melalui, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya , pada 10/10/ 2013 pk 20.11 WIB

dengan dibukanya MULO, HIS, HBS, dan Sekolah Kedokteran, yang kemudian dikenal dengan nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Perubahan ini terkait dengan berkumandangnya politik etis yang memaksa pihak pemerintah Belanda pada masa itu, untuk juga membuka sekolah-sekolah bagi masyarakat pribumi.

Sebagai kota pendidikan, Surabaya telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, meliputi tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hampir di semua bidang ilmu pengetahuan dengan tingkat stratum dari akademi dan politeknik, dari S0, S1, S2 hingga S3, dapat ditemukan di lembaga pendidikan di Surabaya. Pengembangan sebagai kota pendidikan bertujuan untuk pengembangan kualitas SDM yang ada. Hingga saat ini, jumlah sekolah yang ada di Surabaya, adalah

- Kelompok bermain/pra sekolah : 1070 buah
- SD negeri dan swasta : 969 buah
- SLTP negeri dan swasta : 342 buah
- SMU dan SMK negeri dan swasta : 266 buah
- Perguruan Tinggi negeri dan swasta : 60 buah

Di Surabaya juga telah dibangun sekolah-sekolah unggulan dengan fasilitas yang lengkap serta kurikulum dan metode pengajaran yang membuat para siswa lebih berkembang dengan maksimal dalam menyerap pelajaran yang disampaikan. Salah satu sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah tersebut adalah full day school, seperti yang diterapkan pada sekolah Ciputra dan sekolah Al Hikmah. Dalam waktu dekat, juga akan didirikan Sekolah Menengah

Lanjutan Al-Azhar. Namun kemajuan dan modernisasi yang terjadi di Surabaya tidak membuat hal ini menghapus atau meniadakan lembaga pendidikan informal, seperti pondok pesantren dan madrasah.

Surabaya telah memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan SDM. Karya-karya ilmu kedokteran dan farmasi yang dihasilkan para ilmuwan Universitas Airlangga telah menambah kasanah pengetahuan di Indonesia. Para cendikiawan dari Institute Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) juga telah menghasilkan banyak karya di bidang rekayasa teknologi, salah satunya telah berhasil menciptakan model mobil dengan memanfaatkan tenaga matahari. Universitas Negeri Surabaya (dulu IKIP Negeri Surabaya) juga telah berhasil mencetak tenaga guru yang mumpuni yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sejak tiga tahun terakhir, kebijakan Link and Match dari Department Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, walau masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, akan memperbesar manfaat pendidikan bagi perkembangan lingkungan sekitarnya.⁷⁴

3.1.6 Agama

Agama Islam adalah agama mayoritas penduduk Surabaya. Surabaya merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam yang paling awal di tanah Jawa dan merupakan basis warga Nahdatul Ulama yang beraliran moderat. Masjid Ampel didirikan pada abad ke-15 oleh Sunan Ampel, salah satu pioner Walisongo.

⁷⁴ Diakses melalui, <http://www.surabaya.go.id/infokota/index.php?id=4>, pada 10/10/ 2013 pk 20.05 WIB

Agama lain yang dianut sebagian warga adalah Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun Islam merupakan mayoritas di Surabaya kerukunan umat beragama saling menghormati, menghargai dan saling menolong untuk sesamanya cukuplah besar, niat masyarakat Surabaya dalam menjalankan ibadahnya, hal ini bisa dilihat bangunan Masjid Agung Surabaya bersebelahan dengan salah satu gereja besar di kota ini. Di kota ini juga berdiri Gereja Bethany yang merupakan gereja terbesar di Asia Tenggara. Tidak hanya itu saja banyaknya yayasan-yayasan sosial yang berazaskan agama juga banyak, mereka bekerja sama dalam kegiatan bakti sosial.

Bahkan ada satu wadah Kerukunan Umat Beragama di Surabaya yang sering Exist dalam menyikapi suatu problem sosial manusia agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan merusak persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada umumnya serta masyarakat Jawa Timur khususnya. Agama lainnya adalah Yahudi & bahkan terdapat sebuah synagoga (tempat ibadah Yahudi) di jalan kaayon, dekat stasiun gubeng. Umumnya mereka adalah imigran Yahudi dari Baghdad & Yahudi asal Belanda. Ini semakin di perjelas dengan adanya makam khusus orang Yahudi di daerah kembang kuning, Surabaya.⁷⁵

3.1.7 Kondisi Sosial Politik Kota Surabaya

Kondisi politik terkait Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2010 yang memanas ditandai dengan berbagai dinamika yang muncul dalam penetapan calon walikota di masing-masing partai politik di Surabaya. Dimana keputusan petinggi

⁷⁵ Diakses melalui, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya , pada 10/10/ 2013 pk 20.20 WIB

partai yang memberikan tiket politiknya kepada non kader untuk melenggang di pentas pemilihan kepala daerah Kota Surabaya. Begitu juga yang dialami oleh PDI Perjuangan, yang akhirnya memberikan rekomendasi kepada Tri Rismaharini yang notabene adalah non kader sebagai Calon Walikota mendampingi Bambang DH. Dengan menyisihkan Saleh Mukadar yang muncul dari hasil Rakercabsus DPC PDI Perjuangan dalam menjaring dan menyaring calon kepala daerah untuk Kota Surabaya. Yang juga diberitakan menyebabkan munculnya penolakan dari arus bawah yaitu Pengurus Anak Cabang terkait keputusan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Disisi lain juga di alami oleh Partai Demokrat yang akhirnya memberikan rekomendasi kepada Arif Afandi meninggalkan Fandi Utomo yang sebelumnya digadang-gadang akan di ajukan oleh Demokrat sebagai Calon Walikota periode 2010-2015. Padahal Fandi Utomo yang seorang kader partai Demokrat dan berperan dalam tim pemenangan SBY tahun 2004 dan 2009 harus kalah oleh Arif Afandi. Karena Arif Afandi sebagai wakil walikota Surabaya periode 2004-2009 yang sudah terlanjur di berikan tiket untuk maju dalam pemilihan walikota bersama Adies Kadir. Kemudian Fandi utomo berusaha mencari jalan lain untuk maju dalam Pilwali 2010 melalui tiket dari PDS,PKS,PPP, dan PKNU yang memiliki total 11 kursi di DPRD Kota Surabaya. Fandi Utomo akhirnya berduet dengan Yulius Bustami dalam Pilwali 2010 dengan 4 partai pengusungnya. Menyisihkan Yulyani, kader PKS yang santer diberitakan maju dalam Pilwali 2010 ternyata juga harus merelakan keinginannya karena yang dipilih partai untuk maju justru orang lain.

Fitra Jaya dan Naen Suryono menjadi gejala baru dalam Pilwali Kota Surabaya 2010, karena hadir sebagai calon independen. Pasangan calon independen ini berhasil mewarnai kontestasi politik calon kepala daerah kota Surabaya karena berhasil lolos verifikasi KPU, dengan memenuhi persyaratan menyerahkan foto copy KTP sebanyak 90 ribuan sebagai bentuk dukungan untuk dinyatakan lolos verifikasi. Syarat untuk bisa mendaftarkan diri sebagai cawali-cawawali dari jalur independen atau perseorangan memang cukup berat. Karena harus mengumpulkan dukungan yang dinyatakan dalam foto kopi KTP setidaknya 87 ribu dukungan masa, atau 3 persen dari jumlah penduduk Surabaya (2.9 juta jiwa) yang harus tersebar di 16 kecamatan dari 31 kecamatan di wilayah Surabaya

3.2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3.2.1 Sejarah PDI Perjuangan

PDI Perjuangan merupakan Partai Politik yang mempunyai tali kesejarahan secara langsung dengan partai politik pada masa orde lama. PDI Perjuangan adalah kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 yang lahir dari fusi lima Partai Politik yaitu Partai Nasional Indonesia(PNI), Partai Kriren Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Partai Murba.⁷⁶PDI Masa itu mengalami gejala yang tidak pernah surut. Puncaknya terjadi pada saat digelarnya “Mimbar Demokrasi” di halaman Kantor DPP PDI di jalan Diponegoro hingga pada tanggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI.

⁷⁶ Etin Nurhaetin Ningrum, *Dinamika Suara Partai dan Strategi Pemenang pemilu*, (Jakarta: Titian Kencana Mandiri, 2005), 34-35.

Peristiwa itu kemudian dikenal dengan peristiwa “Sabtu Kelabu 27 Juli” yang banyak menelan korban jiwa.

Sorotan media massa terus-menerus dan mengkristalnya kekuatan organisasi non pemerintah dalam mendukung DPP PDI membuat masyarakat semakin bersimpati terhadap PDI pimpinan Megawati dari pada Soerjadi. Di luar perhitungan penguasa, peristiwa Sabtu Kelabu tersebut justru berbalik menjadi titik awal kebangkitan perlawanan terhadap orde baru.

Ketidak ikutsertaan PDI Mega dalam pemilu 1997, merupakan akibat dari usaha Pemerintahan Orde Baru untuk mengeluarkan Megawati dalam kontestasi politik yang merupakan orang yang dianggap “berbahaya” dalam pemerintahan masa itu. Namun justru membuat para pendukung Mega mengalihkan dukungan ke PPP atau memilih menjadi golput. Slogan “Mega Bintang” muncul untuk mempertegas dukungan simpatisan PDI Mega ke PPP. PDI Soerjadi akhirnya hanya memperoleh suara 3.463.225 yang setara dengan 11 kursi di DPR RI. Mengalami penurunan 11.102.331 suara dari hasil pemilu 1992 dimana PDI memperoleh 14.565.556 yang setara dengan 56 kursi di DPR RI.

Terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden semakin meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Krisis kepercayaan mencapai puncak setelah pemerintah pada tanggal 4 Mei 1998 menaikkan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik, yang memicu kenaikan tarif angkutan dan harga barang-barang konsumsi masyarakat. Rakyat mulai berani turun ke jalan, meneriakkan tuntutan agar harga bahan bakar minyak diturunkan dan tuntutan Soeharto turun. Gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa, akhirnya berhasil

memaksa Soeharto turun dari jabatannya dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 sebagai presiden. Kursi Presiden diserahkan kepada B.J Habibi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden RI.⁷⁷

Tak lama setelah pengunduran diri Soeharto, DPP PDI Soerjadi menggelar kongres di Palu pada tanggal 25-27 Agustus 1998 yang menghasilkan ketua umum baru yaitu Budi Harjono. Sementaraitu, DPP PDI Megawati baru akan menggelar kongres di Bali pada 8-10 Oktober 1998. Pada Kongres Bali muncul usulan menambah nama PDI dengan kata Perjuangan setelah nama PDI untuk membedakan PDI pimpinan Budi Hardjono. Dalam kongres ini, peserta secara aklamasi memilih kembali Megawati sebagai formatur tunggal dalam penyusunan struktur DPP.⁷⁸

Pada penutupan kongres, Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan terpilih menerima mandat dari peserta kongres yang mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden RI pada Sidang Umum MPR Tahun 1999. Mega juga mengumumkan daftar pengurus DPP PDI Perjuangan 1998-2003.

Pada tanggal 1 Februari 1999 dibentuklah Partai Demokrasi Indonesia perjuangan disingkat PDI Perjuangan dalam bentuk badan hukum. Penamaan PDI Perjuangan lebih dimaksudkan untuk memenuhi aspek legal formal kepartaian sesuai dengan UU Partai Politik yang baru dan merupakan kelanjutan tak terpisahkan dari PDI yang didirikan pada 10 Januari 1973.

PDI pimpinan Megawati resmi berganti nama menjadi PDI Perjuangan. Lambang gambar banteng bermata merah dan bermulut putih, di dalam lingkaran.

⁷⁷ *Ibid*, 48-49

⁷⁸ Panda Nababan, *Tanpa Rakyat Pemimpin Tak Berarti Apa-apa*, dalam *Ibid*, 49

Lingkaran yang mengelilingi kepala banteng menggambarkan kebulatan tekad untuk memenangkan pemilu 1999. Deklarasi nama dan lambang PDI Perjuangan dilakukan di stadion utama Senayan Jakarta pada hari Minggu tanggal 14 Februari 1999. Megawati memimpin langsung deklarasi yang dihadiri ratusan ribu masa.⁷⁹

Pemilu 1999 adalah kali pertama yang menjadi berkah bagi PDI Perjuangan. Dimana dukungan yang besar mengalir dari masyarakat sehingga menjadikan PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang pada pemilu legislatif. Dibuktikan dengan keberhasilan menempatkan wakilnya di DPR RI sebanyak 153 orang. Dan mengantarkan Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden bersama Abdulrahman Wahid sebagai Presiden ke 4 Republik Indonesia.

Setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan, partai bemoncongputih tersebut memutuskan untuk menggelar Kongres I PDI Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan sebelumnya baru selesai tahun 2003. Salah satu alasan untuk memantapkan konsolidasi organisasi pasca terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden RI. Kongres PDI Perjuangan I diselenggarakan Maret tahun 2000 di Semarang Jawa Tengah. Menjelang Kongres I muncul nama-nama calon kandidat, diantaranya Dimiyati Hartono yang masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, Eros Jarot yang memang menggalang dukungan dari DPC-DPC, dan Megawati Soekarnoputri.

Namun kongres I PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua

⁷⁹ *Ibid*, 49-50

Umum. Setelah Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden republik Indonesia ke 5 menggantikan Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR.

Meski PDI perjuangan mendapat cap sebagai partai penguasa, namun ternyata tidak mampu meraih kemenangan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara di urutan kedua setelah Partai Golkar dengan 109 kursi di DPR RI. Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan pada Maret 2005 di Denpasar Bali, tempat dimana pernah diselenggarakan Kongres V PDI tahun 1998. Nama-nama yang muncul dan akan maju sebagai kandidat Ketua Umum PDI Perjuangan antara lain adalah Guruh Soekarnoputra yang digagas oleh Imam Mundjiamat Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Laksamana Soekardi, Roy BB Janis, Arifin Panigoro, dan Sopan Sophian.

Masing-masing calon tersebut giat melakukan penggalangan kekuatan dengan dukungan di daerah. Namun dalam perkembangannya, kelima calon tersebut bergabung menjadi satu dalam satu wadah yang disebut “Kelompok Gerakan Pembaharuan PDI Perjuangan” yang mengusung satu nama calon yaitu Guruh Soekarnoputra sebagai calon Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Kongres II PDI Perjuangan akhirnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2005 setelah Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum terpilih karena semua peserta dalam pandangan umumnya mengusulkan Megawati sebagai Ketua Umum dan Ir Pramono Anung sebagai Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan periode 2005-2010.

Di pemilu legislatif 2009, PDI Perjuangan hanya memperoleh suara sebesar 14.600.091 dari 104.009.785 suara sah nasional yang terdaftar di KPU. Sehingga PDI Perjuangan hanya berhasil menempatkan 93 wakilnya di DPR RI. Itu berarti suara PDI Perjuangan secara umum dalam pemilu legislatif kembali mengalami penurunan 16 kursi dari 109 kursi yang diperoleh nya pada pemilu legislatif tahun 2004. Dan menempatkan PDI Perjuangan dalam peringkat ke tiga setelah partai Demokrat dan partai Golkar. Dalam pilpres 2009 pun PDI Perjuangan mengalami kekalahan. Dimana saat itu PDI Perjuangan yang berkoalisi dengan Partai Gerindra dengan mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai calon Presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden. Yang akhirnya harus mau mengakui kemenangan Susilo Bambang Yodoyono dan Boediono dari Partai Demokrat menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009-2014.

Kongres Nasional ke III PDI Perjuangan kembali di gelar di Denpasar Bali pada April 2010. Dalam kongres tersebut PDI Perjuangan kembali memunculkan nama Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2010-2015 dengan Sekertaris jendral Tjahjo Kumolo. Megawati terpilih kembali menjadi ketua umum PDI Perjuangan dengan dukungan 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Dengan semangat melanjutkan ideologi secara murni dan konsekuen, kongres kali ini berhasil membentuk struktur baru yang disebut Majelis Ideologi yang juga dipimpin oleh Ketua Umum karena sebagai pemimpin tertinggi dalam Partai. Posisi Majelis ideologi dimaksudkan untuk memperkuat

dan menunjukkan jati diri PDI Perjuangan sebagai partai ideologis pro rakyat, berdasarkan Pancasila 1 Juni.

3.2.2 Visi Misi PDI Perjuangan

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama di atas. Untuk itu, PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan bertugas untuk:

1. **Pertama**, mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. **Kedua**, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai.
3. **Ketiga**, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.

Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk

mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur;
3. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat;
4. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis; dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa;
5. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
6. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
7. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila; dan

8. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

Hingga kemudian dari seluruh visi dan misi tersebut diimplementasikan melalui tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap elemen partai di semua jajaran kepengurusan mulai dari tingkatan teratas DPP, DPD, DPC, PAC sampai pada Ranting dan Anak Ranting

3.2.3 Struktur Pengurus PDI Perjuangan Kota Surabaya

PDI Perjuangan sebagai partai politik yang ada di Indonesia mempunyai struktur organisasi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar BAB V tentang organisasi pasal 22⁸⁰ dijelaskan bahwa, dalam rangka melaksanakan tugas partai, disusun jenjang kepengurusan sebagai berikut:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai yang meliputi seluruh NKRI
2. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai yang mewakili Propinsi
3. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai yang mewakili Kota/Kabupaten
4. Pengurus anak cabang disingkat PAC Partai yang meliputi wilayah kecamatan
5. Pengurus Ranting Partai yang meliputi wilayah desa / kelurahan
6. Pengurus Anak Ranting yang meliputi wilayah dusun/ dukuh/ rukun warga/ gang.

PDI Perjuangan Kota Surabaya adalah cabang yang mempunyai kesejarahan yang panjang. Semenjak masih menjadi nama PDI hingga lahir

⁸⁰ AD/ART PDI Perjuangan pada Anggaran Dasar BAB V tentang organisasi pasal 22

nama baru PDI Perjuangan. Sehingga nama DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menjadi bagian dari sejarah lahirnya partai dengan kepemimpinan yang berganti-ganti tiap periodenya hingga sekarang. Pergantian kepengurusan setidaknya telah tercatat sebanyak 6 periode kepemimpinan dalam sejarah DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Tidak berbeda dengan pada umumnya tiap kepemimpinan, pada satu periode adalah 5 tahun kepemimpinan baik itu di struktural Dewan Perwakilan Pusat, Dewan Perwakilan Daerah maupun sampai Dewan Perwakilan Cabang.

Namun karena alasan dinamika organisasi yang berkembang bisa saja dalam satu periode tidak penuh lima tahun. Karena harus diberhentikan di tengah perjalanan kepemimpinannya, karena impichmen politik. Namun apabila konflik organisasi atau dinamika internal organisasi dapat di lokalisir dengan baik, maka tak hayal bisa berjalan penuh lima tahun pada satu periode masa kepemimpinannya. Bahkan bisa memungkinkan untuk menjabat di periode kedua, dengan syarat dapat terpilih kembali dalam Rapat Kerja Cabang seperti yang diatur dalam AD/ART partai.

Dari awal berdiri menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bergambar moncong putih sebagai simbolnya. Pertama kali DPC PDI Perjuangan di nahkodai oleh Bu Aritonang, dimana beliau adalah keturunan Batak dan sekaligus juga Ketua DPC perempuan satu-satunya sampai saat ini. Namun dalam dinamika yang berkembang hanya tiga tahun periode kepemimpinan beliau, harus memaksanya untuk turun karena dinamika politik yang tidak dapat diredam oleh beliau. Setelah itu, digantikan oleh Sutikno sebagai ketua dan Bambang DH

sebagai sekretaris nya. Padahal suara dari bawah menginginkan Bambang lah yang menjadi ketua, namun dengan alasan usia Bambang DH yang saat itu masih muda maka Pak Tjip menolaknya.

Di periode kedua ini yang di nahkodai oleh Sutikno pun juga tidak begitu kuat, yang bergejolak karena yang mempunyai kekuatan adalah kelompok dari Basuki yang pada waktu itu sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya. Periode ketiga pun akhirnya muncul dengan Basuki sebagai ketua, meninggalkan Sutikno sebagai ketua yang hanya berjalan satu tahun di periode kepemimpinannya. Basuki dalam kepemimpinannya pun harus dipaksa mundur pula seperti periode Sutikno yang hanya berumur persis satu tahun dalam periode kepemimpinannya. Hal tersebut karena masalah dalam pencalonan calon Walikota Surabaya dari PDI Perjuangan waktu itu.

Periode ke empat terpilih Bambang DH sebagai ketua DPC yang juga lagi-lagi hanya berumur satu tahun dari tahun 2002-2003. Namun di periode ke lima Saleh Ismail Mukadar dan Wisnu Sakti Buana terpilih menjadi ketua dan sekretaris terpilih. Dan menjabat penuh lima tahun pada periode 2005-2010, hal tersebut dapat terjadi oleh karena kondisi politik di internal pada waktu itu dapat dikendalikan dengan baik. Sampai saat Rakercab DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya terakhir tahun 2010 yang menandai berakhirnya masa jabatan sebelumnya secara aturan organisasi yang telah ada dalam AD/ART. Dan periode ke enam ini, terpilih Wisnu Sakti Buana yang notabene adalah anak almarhum Ir Sutjipto (Pak Tjip) sebagai ketua dan Armuji sebagai sekretaris. Periode kepemimpinan DPC PDI Perjuangan tersebut dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 7
Periode Kepemimpinan DPC PDI P Kota Surabaya

NO	Kepemimpinan	Periode
1	Aritonang	1996-1999
2	Sutikno-Bambang	1999-2000
3	Basuki	2000-2001
4	Bambang DH	2002-2003
5	Saleh Mukadar- Wisnu Sakti	2005-2010
6	Wisnu Sakti- Armuji	2010-2015

Sumber: DPC Kota Surabaya

Strutural Pengurus PDI Perjuangan Kota Surabaya

Dari hasil Rapat Kerja Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya pada tahun 2010. Telah ditetapkan dengan SK No 09.25-A/TAP-DPC/DPP/XII/2010 tertanggal 21 Desember 2010, tentang kepengurusan DPC Partai periode 2010-2015 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 8
Struktur Komposisi dan Personalia
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kota Surabaya

Jabatan	Nama
Ketua	Whisnu Sakti Buana, ST
Wakil Ketua :	
Bid. Kehormatan Partai	H. Syaifuddin Zuhri

Bid. Politik dan Hub. Antar Lembaga	Adi Sutarwijono
Bid. Organisasi, Keanggotaan dan Rekrutmen	Sukadar
Bid. Informasi dan Komunikasi	Drs. Taroe Sasmito
Bid. Pertanian, Perikanan dan Kelautan	Untung
Bid. Kesehatan, Perempuan dan Anak	Hj. Siti Mariyam
Bid. Pendidikan, Kebudayaan, Keagamaan dan Lingkungan Hidup	Iwan Daswanto
Bid. Industri, Perdagangan, Pengusaha Kecil-Menengah dan Tenaga Kerja	Djoko Prasektyo
Bid. Pemuda dan Olahraga	Tri Didik Adiono, S.Sos
Bid. Transportasi, Infrastruktur dan Perumahan	Anas Karno, SE
Bid. Hukum, HAM dan Perundang-undangan	Anugrah Ariyadi, SH
Sekretaris	Ir. Armuji, MH
Wkl. Sek. Bid. Internal	H. Heru Rusianto, SH
Wkl. Sek. Bid. Program	Heru Arifin
Bendahara	Baktiono
Wkl. Bend. Bid. Inventarisasi dan Kekayaan Partai	Hj. Agustin Poliana, SH. M.Si

Sumber: DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

3.2.4 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Jenjang hirarki struktural partai diatur dalam AD/ART PDI Perjuangan sebagai hasil Kongres. Kongres sendiri adalah keputusan tertinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mulai dari struktural DPP, dalam pasal 24 Anggaran Dasar PDI Perjuangan diatur mengenai struktur dalam DPP PDI Perjuangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 24 (Ketua Umum)

- 1) DPP Partai dipimpin oleh satu orang Ketua Umum yang berwenang, bertugas, dan bertanggung jawab atas Eksistensi, Program dan Kinerja Partai ke dalam dan keluar;
- 2) Ketua Umum mempunyai Hak Prerogatif untuk mempertahankan: Eksistensi Partai, Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 25 (Ketua-Ketua Bidang Internal)

Ketua Umum dibantu beberapa orang Ketua Bidang yang bertugas menangani fungsi dan masalah internal Partai meliputi Kehormatan Partai; Politik dan Hubungan Antar Lembaga; Kaderisasi; Keanggotaan; Organisasi; Rekrutmen; Informasi; Komunikasi; Sumber Daya dan Dana.

Pasal 26 (Ketua-Ketua Bidang Program)

- 1) Ketua-Ketua Bidang Program yang bertugas menangani Program Partai dalam Bidang Kehidupan Masyarakat meliputi Pertanian dan Perikanan; Kelautan; Kesehatan; Tenaga Kerja; Pendidikan, Kebudayaan, dan

Keagamaan; Industri dan Perdagangan; Pengusaha Kecil-Menengah; Koperasi; Pemuda dan Olahraga; Perempuan dan Anak.

2) Ketua-Ketua Bidang Program yang bertugas menangani Program Partai dalam Bidang Lembaga Pemerintahan meliputi Transportasi, Infrastruktur, dan Perumahan; Energi, Pertambangan, dan Lingkungan Hidup; Kehutanan dan Perkebunan; Keuangan dan Perbankan; Hukum, HAM, dan Perundang-undangan; Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Pertahanan dan Keamanan; Hubungan Internasional.

Pasal 27 (Sekretaris Jenderal)

Sekretaris Jenderal adalah DPP Partai yang dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 28 (Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal)

Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal adalah DPP Partai yang mewakili Sekretaris Jenderal di bidangnya.

Pasal 29 (Bendahara Umum)

Bendahara Umum adalah DPP Partai yang dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum.

Pasal 30 (Wakil-Wakil Bendahara Umum)

Wakil-Wakil Bendahara Umum adalah DPP Partai yang mewakili Bendahara Umum di bidangnya.

Pasal 31 (Majelis Ideologi)

1) Majelis Ideologi dibentuk dari Pengurus DPP Partai dan Tokoh Partai yang dipilih dan dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai.

2) Majelis Ideologi berfungsi untuk menjaga arah perjuangan Partai agar tetap selaras dengan jiwa dan semangat lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.

3) Majelis Ideologi bertugas mengawal kebijakan Partai agar tidak keluar dari ideologi Partai, mempertahankan: Eksistensi Partai, Pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 32 (Departemen Departemen)

1) Departemen adalah unsur staf pada setiap Ketua Bidang yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan tugas bidang.

2) Departemen sebagai unsur staf bertugas untuk menghimpun, mengolah informasi dan data, dan menyusun rancangan kebijakan, program, aksi dan solusi yang disampaikan kepada Ketua Bidang.

Dalam pasal 34 dan pasal 35 Anggaran Dasar PDI Perjuangan diatur struktural kedua dibawah DPP yaitu DPD yang melaksanakan fungsi partai di daerah yang mewakili Provinsi di Indonesia yaitu sebagai berikut:

Pasal 34

Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai meliputi wilayah Provinsi;

Pasal 35

1) Tugas dan Fungsi DPP Partai di daerah dilaksanakan oleh DPD Partai;

2) Struktur dan komposisi DPD Partai berjumlah sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) orang dan sebanyak-banyaknya 23 (dua puluh tiga) orang;

3) Pengurus DPD Partai terdiri atas:

- a) Ketua DPD Partai;
- b) Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal;
- c) Wakil-Wakil Ketua Bidang Program;
- d) Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris;
- e) Bendahara dan Wakil Bendahara.

Dalam Anggaran Dasar pasal 36 dan pasal 37 juga telah diatur mengenai kepengurusan di tingkat Kabupaten dan Kota secara struktural dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 36

Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai meliputi wilayah kabupaten/ kota;

Pasal 37

- 1) Tugas dan Fungsi DPP Partai dan DPD Partai di kabupaten/ kota dilaksanakan oleh DPC Partai;
- 2) Struktur dan komposisi DPC Partai berjumlah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang.
- 3) Pengurus DPC Partai yang terdiri dari :
 - a) Ketua DPC Partai,
 - b) Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal;
 - c) Wakil-Wakil Ketua Bidang Program;
 - d) Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e) Bendahara dan Wakil Bendahara.

Kepengurusan dibawah DPC Partai juga diatur dalam Anggaran

Dasar pasal 38 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 38

- 1) Pengurus Anak Cabang disingkat PAC Partai yang meliputi wilayah kecamatan;
- 2) Tugas dan Fungsi DPD Partai dan DPC Partai di kecamatan/ distrik dilaksanakan oleh PAC Partai dengan susunan kepengurusan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang;
- 3) Pengurus Ranting Partai yang meliputi wilayah desa/kelurahan dan atau yang setingkat;
- 4) Tugas dan Fungsi DPC Partai dan PAC partai di kelurahan/ desa dilaksanakan oleh Pengurus Ranting Partai dengan susunan kepengurusan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang;
- 5) Pengurus Anak Ranting Partai meliputi wilayah dusun/ dukuh/ rukun warga/ lorong/ gang dan atau sebutan lainnya;
- 6) Tugas dan Fungsi PAC Partai dan Pengurus Ranting di dusun/ dukuh/ rukun warga/ lorong/ gang dilaksanakan oleh Pengurus Anak Ranting Partai, dengan susunan kepengurusan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

Hirarki struktural juga dapat dilihat dalam Anggaran Dasar pada bagian tentang Pembekuan, Pembubaran Pengurus Partai Pasal 33.

1. DPP Partai dapat melakukan pembekuan atau pembubaran kepengurusan Partai di bawahnya.

2. DPD Partai dapat membekukan dan membubarkan PAC Partai.
3. DPC Partai dapat membubarkan Pengurus Ranting Partai dan Pengurus Anak Ranting Partai.
4. Dalam hal diperlukan pembekuan atau pembubaran kepengurusan Partai untuk tingkat DPD dan DPC Partai maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan Partai tersebut ditangani DPP Partai untuk membentuk kepengurusan yang baru.

Ditambah dengan hirarki aturan partai dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan yang terdapat pada Pasal 76 yang berbunyi “Aturan Partai terdiri atas Ketetapan dan Keputusan yang disusun secara hierarkis.”. Dan dipertegas pada pasal 77 dan 78 sebagai berikut:

Pasal 77

- 1) Ketetapan Partai yang tidak terpengaruh oleh dinamika internal maupun eksternal adalah bersifat tetap/ konstan;
- 2) Keputusan Partai yang dapat berubah yang disesuaikan dengan kebutuhan dinamika adalah bersifat temporer.

Pasal 78

- 1) Ketetapan/ Keputusan Partai yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan/ Keputusan Partai yang lebih tinggi dan batal dengan sendirinya;
- 2) DPP Partai mengesahkan komposisi dan personalia DPD Partai dan DPC Partai;

- 3) DPD Partai mengesahkan komposisi dan personalia PAC Partai serta melaporkan ke DPP Partai;
- 4) DPC Partai mengesahkan komposisi dan personalia Ranting Partai serta melaporkan ke DPD Partai;
- 5) PAC Partai mengesahkan komposisi dan personalia Anak Ranting Partai serta melaporkan ke DPC Partai.

Hirarki kepengurusan secara struktural dan aturan diatas mempunyai kelemahan yaitu dapat menciderai asas demokrasi apabila kepengurusan diatasnya tidak bijak dalam mengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan kepentingan politik yang terkadang berlawanan di tiap jenjang kepengurusan dalam organisasi politik. Dimana apabila terjadi konflik, maka struktur diatasnya bisa membekukan atau membubarkan struktur kepengurusan dibawahnya. Namun hal tersebut dapat dihindari apabila konsolidasi dapat dilakukan dengan baik antar jenjang kepengurusan.

3.2.5 Kekuatan Politik PDI Perjuangan di Surabaya

Pemilukada 2005

Pada hari Kamis 7 Juli 2005 KPUD Kota Surabaya menetapkan hasil pemilihan kepala daerah langsung Kota Surabaya di Kantor KPUD Surabaya. Pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Dwi Hartanto-Arif Afandi secara resmi ditetapkan sebagai pemenang pilkada yang berlangsung pada 27 Juni 2005 tersebut.

Penetapan hasil pilkada Kota Surabaya ini sempat dihantui bakal terjadi demonstrasi dari para pendukung calon yang kalah. Apalagi, sehari sebelumnya Kantor KPUD Kota Surabaya sempat diduduki massa yang mengatasnamakan

Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan dengan koordinator Taufik Monyong. KPUD Surabaya juga sempat didatangi sejumlah petinggi partai di Surabaya seperti PKB, PAN, PKS dan Golkar yang menghendaki penundaan penetapan hasil pilkada.

Pasangan Bambang Dwi Hartanto-Arif Afandi mengantongi 492.999 atau 51,34 persen suara sah. Sementara, pesaingnya, calon PKB Alisyahbana-Wahyudin Hussein mendapatkan 199.057 atau 20,73 persen, disusul calon PD dan PAN Erlangga Satriagung-AH Thony meraih 179.255 atau 18,67 persen dan pasangan Gatot Sudjito-Benyamin Hilli (Golkar-PDS) yang mendapatkan 88.929 atau 9,26 persen. Jumlah suara sah sebanyak 960.240 suara.⁸¹

Tabel

Perolehan Pemilukada Kota Surabaya 2005

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	%
1	Bambang DH-Arif Afandi	PDI Perjuangan	492.999	51,34
2	Alisyahbana-Wahyudin Hussein	PKB	199.057	20.73
3	Erlangga Satriagung-AH Thony	Demokrat-PAN	179.255	18.67
4	Gatot Sudjito-Benyamin Hilli	Golkar-PDS	88.929	9.26

Sumber: PDI Perjuangan Kota Surabaya

Pemilu Legislatif DPRD Surabaya 2004 dan 2009

Peta politik di Surabaya adalah seperti kehidupan sosial yang tidak berhenti untuk berubah. Persaingan politik sangat kental di Surabaya. Acuan peta

⁸¹ Diakses melalui <http://www.tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2005/07/07/brk,20050707-63535.id.html>, pada 12/01/2013 pk 09.00 WIB

politik dapat dilihat pada hasil pemilu legislatif 2004 yang mengindikasikan peta perubahan politik di Kota Surabaya sesuai data di bawah ini:

Tabel 9

Hasil Pemilu Legislatif Kota Surabaya 2004

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	384337
2	Partai Kebangkitan Bangsa	309389
3	Partai Demokrat	185257
4	Partai Amanat Nasional	104015
5	Partai Damai Sejahtera	93352
6	Partai Golongan Karya	82507
7	Partai Keadilan Sejahtera	80726
8	Partai Persatuan Pembangunan	30080
9	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	20594
10	Partai Karya Peduli Bangsa	16028

Sumber: KPU Kota Surabaya Tahun 2004

Data di atas menunjukkan bahwa perolehan suara partai tertinggi diraih oleh PDI-P disusul oleh PKB pada urutan kedua. Pada waktu itu PDI-P sangat mendominasi pemilih Kota Surabaya. Kemudian pada pemilu 2009 dimana pembentukan daerah pemilihan (Dapil) di kota Surabaya dibagi menjadi 5 daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD. Dari pembagian daerah pemilihan di Kota Surabaya itu, yaitu:

1. Dapil I meliputi : Gubeng, Genteng, Simokerto, Bubutan, Krembangan, dan Tegalsari (11 kursi)
2. Dapil II meliputi : Tambaksari, Kenjeran, Bulak, Semampir, dan Pabean Cantikan (11 kursi)
3. Dapil III meliputi : Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyar, Rungkut, Sukolilo, dan Mulyorejo (8 kursi)
4. Dapil IV meliputi : Jambangan, Gayungan, Wonokromo, Wonocolo, Dukuh Pakis, Wiyung, dan Sawahan (11 kursi)
5. Dapil V meliputi : Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Tandes, Sukomanunggal, Asemrowo, Benowo, dan Pakal (9 kursi).

Dimana peserta pemilu tahun 2009 yang diikuti oleh 44 partai, yang dikurangi enam partai lokal yang khusus untuk wilayah Aceh. Jadi seluruh partai peserta pemilu setelah dikurangi partai lokal Aceh menjadi 38 partai politik yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan dinyatakan lolos verifikasi untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2009. Di bawah ini adalah tabel perolehan suara PDI Perjuangan di setiap daerah pemilihan di kota Surabaya:

Tabel 10
Perolehan Suara Legislatif Surabaya 2009

No	Partai	Perolehan Suara						Jumlah Kursi
		DP I	DP II	DP III	DP IV	DP V	Total	
1	Demokrat	66.997	64.867	39.985	84.388	55.555	311.792	16
2	PDIP	45.351	41.804	21.208	52.704	27.943	189.010	8
3	PKS	14.496	13.518	9.980	16.629	10.825	65.358	5

4	PKB	11.216	13.898	12.304	14.112	12.712	64.242	5
5	PDS	12.406	8.434	12.585	13.596	7.939	54.960	4
6	Golkar	13.071	10.214	6.343	13.454	10.467	53.549	5
7	PAN	13.514	7.360	6.031	9.051	17.571	53.527	2
8	Gerindra	8.739	9.774	4.829	10.331	7.833	41.560	3
9	PPP	5.728	15.263	2.452	2.567	3.590	29.600	1
10	PKNU	3.674	9.682	5.206	3.224	1.900	23.686	1

Sumber: KPUD Surabaya

Dari hasil pemilu legislatif DPRD Kota Surabaya tahun 2009 dapat terlihat bagaimana posisi strategis kekuatan politik yang dimiliki PDI Perjuangan di kota Surabaya. Yang menempatkan partai bergambar moncong putih tersebut urutan kedua partai terbesar di kota Surabaya. Dan dapat dilihat dalam tabel perolehan suara PDI Perjuangan di kota Surabaya berikut ini.

Tabel 11

Perolehan Suara PDI Perjuangan di DPRD Kota Surabaya 2009

Dapil	Perolehan Suara	Total Suara Sah	Jumlah Perolehan Kursi	Total Kursi
1	45.351	215.885	2	11
2	41.804	222.173	2	11
3	21.208	135.731	1	8
4	52.704	241.353	2	11
5	27.943	180.344	1	9
Jumlah	189.010	995.486	8	50

Sumber: DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

Berdasarkan tabel tersebut, dari 10 partai yang mendapat suara di pemilu legislatif kota surabaya. Maka dapat dilihat daftar anggota legislatif dari DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya berdasarkan dapil sebagai berikut:

Tabel 12
Anggota legislatif dari DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya
2009-2014

No	Dapil	Nama Calon Terpilih	No Urut	Suara Sah
1	I	Tri Didik Andiono, S.Sos	1	4.846
2	I	Hj Agustina polaina, S.Sos	3	7.216
3	II	Baktiono,B.A	1	7.314
4	II	Hj Khusnul Khotimah, S.Pd	3	4.947
5	III	H Rizkie Darma Putra, S.Sos	1	6.752
6	IV	Wisnu Sakti Buana, ST	1	5.436
7	IV	Ir Armuji, MH	2	9.754
8	V	Syaifuddin Zuhri	2	5.436

Sumber: KPUD Surabaya